

## **ETIKA ISLAM DAN EKONOMI KERAKYATAN**

**Musa Asy'arie**

IAIN Sunan Kalijaga

### **ABSTRACT**

In a new Indonesian format, there appears a great desire to accelerate people's economy as the basis of the economic stability and national defense. This is due to the fact that indicates that the collapse of the Indonesian economy nowadays is dramatically caused by the weakness of the fundamentals of the national economy in which small and mediom enterprises cannot get a chance to develop to a maximum.

It is in this effort that the populist's economy as an economic system oriented to people's interest and empowerment may be an alternative to make it awake. This means shifting from a capitalistically economic system to a populist's one. Hence, it is necessary to make an integral, actual and realistic concept which may be implemented in the concrete and consistent policy and conduct of political economy.

In addition, the problems faced to carry out the populist' economic system are: 1) culture, 2) structure, 3) environment. The first problem (culture) refers to industrial and agraria culture, work ethos; the second problem (structure) involves capital, market, and technological expertise; whereas the last problem (environment) comprises geographical environment, people's tradition, and internal work culture.

In line with those above, The Islamic ethics as a moral foundation in all aspects of life has a significant role in offering ethic guidelines in the Indonesian people's economic order, most of which are Islam (80%). The ethic-normative doctrines in Islam consist of those to take much care of the poor, orphan, equality, ownership in relation to others' rights, fair and just competition, significantly mutual cooperation and so on.

Dalam format Indonesia Baru, muncul keinginan untuk memperkuat ekonomi rakyat, sebagai basis stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional (Sritua Arief, 1995: 29-42). Keinginan tersebut sangat wajar, karena kenyataan menunjukkan bahwa

kejatuhan ekonomi dewasa ini, antara lain disebabkan oleh adanya kenyataan lemahnya fundamental ekonomi nasional, di mana usaha skala kecil dan menengah tidak memperoleh peluang berkembang secara maksimal. Pemberdayaan ekonomi rakyat atau usaha skala kecil itu sangat penting, untuk mengatasi angka kemiskinan yang sudah mencapai 113 juta orang (Kompas, 1998). Di samping itu, juga dapat menyerap tenaga kerja lebih besar, sehingga dapat mengatasi problem pengangguran yang makin gawat, yang menurut keterangan pers menteri tenaga kerja RI Fahmi Idris menjelaskan bahwa jumlah angka pengangguran telah mencapai 22 juta orang (Jawa Pos, 1999) serta lebih dapat berkelit dalam menghadapi "krismon", lebih efisien dan lebih mempunyai kemampuan untuk dapat segera melakukan adaptasi dengan perubahan.

## **KONSEP MENGENAI RAKYAT**

Kata rakyat adalah kata yang abstrak. karena secara fisik kita tidak dapat melihat dan memegangnya, karena yang dapat dilihat dan dipegang adalah satuan individualitas dari rakyat. Seperti juga kata binatang, kita tidak bisa melihat dan menangkap binatang, kecuali binatang itu seekor kucing satu-satunya yang ada di ruang baca perpustakaan Fakultas Ekonomi UGM, sehingga yang ditangkap adalah seekor kucing satu-satunya itu, bahwa seekor kucing itu adalah binatang, ya, tetapi binatang tidak hanya seekor kucing saja. Oleh karena itu, jika dikatakan perjuangan ini untuk rakyat atau memperjuangkan kepentingan rakyat, maka yang perlu ditanyakan adalah rakyat yang mana, siapa, di mana dan berapa jumlahnya.

Secara politik, rakyat seringkali diletakkan secara berhadapan dengan penguasa atau pemerintah. Meskipun pemerintah atau penguasa sesungguhnya memperoleh amanat dan wewenang kekuasaan dari rakyat, untuk menjaga, melayani dan menyelamatkan kepentingannya. Akan tetapi, seringkali penguasa atau pemerintah berada dalam posisi berlawanan dengan rakyat, padahal rakyat dipakai sebagai alat iegitimasi dari kekuasaan pemerintah. Dalam hal demikian, rakyat dapat menggugat dan melawannya, bahkan menjatuhkannya dengan mencabut wewenang atau kekuasaan yang telah diberikan kepada pemerintah, baik melalui cara-cara yang konstituisional maupun in-konstituisional melalui revolusi sosial. Secara sosial, rakyat adalah besaran jumlah individu yang lazimnya tidak memegang jabatan di

pemerintahan. Rakyat adalah terdiri dari satuan individu pada umumnya, jenis manusia kebanyakan. Kekuatan rakyat tidak pada satuan individualitas, tetapi besaran satuan individualitas. Karena capaian jumlah yang besar, maka rakyat memegang kekuasaan yang hampir tidak terbatas.

Dalam kaitannya dengan budaya, terutama dalam istilah kebudayaan Jawa, maka rakyat adalah wong cilik yang berada di luar sistem kekuasaan raja dan semakin jauh dari kehidupan kraton, maka semakin jauh pula dari pusat kekuasaan. Kehidupan wong cilik kemudian melebar ke daerah-daerah pesisiran dengan budaya, dan bahasa ngoko serta kesenian yang kasar. Dua kutub pandangan dikhotomi Jawa tentang alus dan kasar antara lain nampak nyata dalam kesenian. Kesenian rakyat atau wong cilik adalah kesenian yang kasar, seperti ludruk, ledek munyuk, jaran kepeng, yang pada umumnya hidup subur di masyarakat kelas bawah dan pesisiran.

## **EKONOMI RAKYAT**

Kata rakyat dalam konteks ekonomi menunjuk pada kegiatan usaha skala kecil, baik dalam permodalannya, sarana teknologi produksi yang sederhana, pengelolaan usaha (manajemen) yang belum bersistem, yang sepenuhnya tergantung pada perorangan sebagai pemiliknya, serta perhitungan harga produksi juga tidak jelas, mengakibatkan keuntungan diperolehnya pun semu. Ekonomi rakyat adalah ekonominya para bakul-bakul di pasar tradisional (pedagang kecil) pemilik warung, para petani dan pelaku industri kerajinan dalam masyarakat yang masih mewarisi pekerjaan tradisional. Dalam kaitan ini, meskipun mbak Tutut menyatakan dirinya sebagai rakyat, tetapi kegiatan usahanya sepenuhnya tidak bisa disebut ekonomi rakyat.

Ekonomi rakyat pada hakikatnya tumbuh secara alamiah, karena dorongan kebutuhan untuk dapat bertahan hidup, sehingga seseorang harus bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Ekonomi rakyat lazimnya dimulai dari pemanfaatan potensi ekonomi yang ada di sekeliling hidupnya, baik potensi pasar, tenaga kerja, maupun sumber daya alam untuk produksi. Pada awalnya tidak ada konsep yang jelas dan menyeluruh, pokoknya bekerja dengan cara menggerakkan tenaga, pikiran dan anggota tubuhnya. Dalam proses belajar secara alamiah ini, berlangsung seleksi alam yang ketat, sehingga

diantara mereka ada yang kalah dan jatuh, lantas menjadi buruh dan karyawan, sedangkan yang lainnya ada yang lulus dan memenangkan seleksi alam, sehingga skala usahanya pun tumbuh berkembang makin besar, seperti Haji Agung dari penjual koran eceran menjadi pengusaha besar dibidang buku dan alat perkantoran, demikian juga Williem Suryajaya, pedagang sayur yang menjadi pengusaha besar otomotif.

Sedangkan ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berorientasi pada kepentingan dan untuk pemberdayaan rakyat (P.T. Bank BNI (Persero) Tbk., 1999: 2-7). Dalam sistem ekonomi kerakyatan, yang penting adalah substansinya, yaitu untuk kepentingan dan pemberdayaan rakyat, seperti harga produknya dapat terjangkau oleh daya beli rakyat, dengan jaminan kualitas yang baik, pengelolaan manajemen usaha yang efisien dan efektif, sehingga tidak membebani harga produknya. Jadi bukan pada bentuknya seperti koperasi atau tidak, juga bukan pada besar kecil usahanya. Oleh karena itu, bisa saja sistem ekonomi kerakyatan tidak berbentuk koperasi dan bisa saja bentuk koperasi justru berlawanan dengan sistem ekonomi kerakyatan, jika koperasi tidak berorientasi untuk membela kepentingan dan pemberdayaan rakyat, seperti yang terlihat antara lain oleh PUSKUD pada rezim orde baru, yang mengelola cengkeh, yang justru dalam kerjanya banyak merugikan petani cengkeh sendiri, hal yang sama juga terjadi dalam koperasi yang mengelola tata niaga jeruk Pontianak.

Namun demikian, persoalannya tentu tidak semudah membalik tangan, karena membalik sistem ekonomi kapitalisme (Doreen Massey, 1995: 297-307), kepada sistem ekonomi kerakyatan, memerlukan konsep integral yang aktual dan realistik, yang dapat diimplementasikan dalam tindakan politik-ekonomi yang konkret dan konsisten (Ann O. Krueger, 1993: 351-356), terutama dalam memberantas KKN untuk pemberdayaan ekonomi rakyat, mengubah struktur ekonomi nasional dengan memperbanyak kelas menengah (Syahrir, 1995), serta membangun infrastruktur ekonomi untuk melayani dan memperkuat kegiatan ekonomi rakyat. Di samping itu perlu adanya suatu lembaga advokasi yang dapat memberikan pembelaan terhadap ekonomi rakyat dari kebijaksanaan politik ekonomi yang meminggirkan peranan ekonomi rakyat.

Bagi ekonomi rakyat atau usaha skala kecil, adanya bantuan modal, teknik, manajemen, peralatan dan pelatihan adalah sangat penting, akan tetapi yang lebih

penting lagi adalah bantuan pasar. Karena pasar mempunyai mekanisme otonom, yang biasanya sulit ditembus oleh hanya dengan mengandalkan kekuatan dari ekonomi rakyat atau usaha skala kecil secara sendirian. Bantuan pasar dapat dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya dengan membuka dirinya sendiri, untuk menjadi pasar bagi ekonomi rakyat atau usaha skala kecil, tetapi juga dengan menciptakan forum pemasaran keluar negeri serta bantuan informasi selengkapnya mengenai proses pemasaran di luar negeri. Jika ini gagal, maka dalam era pasar bebas dunia, kita hanya akan menjadi pasar bagi bangsa lain, pasar yang cukup besar, karena jumlah penduduk kita yang paling besar nomor empat di dunia, ibarat pertandingan sepakbola, kita akan. kebobolan terus, tanpa mampu membobol gawang lawan.

## **PROBLEMATIKA EKONOMI RAKYAT DI LAPANGAN**

Perbincangan mengenai pemberdayaan ekonomi rakyat seharusnya tidak hanya berhenti pada diskusi akademik untuk merumuskan konsep teoritik, karena persoalan ekonomi rakyat di lapangan ternyata sangat kompleks, yang tidak bisa didekati dengan pendekatan tunggal, pendekatan politik atau ekonomi semata-mata.

Problematis yang dihadapi dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan ekonomi rakyat, pada dasarnya dapat di kategorikan pada tiga hal, yaitu : 1) kultur 2) struktur dan 3) lingkungan. Ketiga persoalan di atas, satu sama lain saling terkait dan saling memengaruhi, sehingga menampilkan wajahnya yang penuh kompleksitas. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendekatan yang lebih menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan (Musa Asy'arie, 1997: 121-154).

### **1. Problematik Kultural**

Pada umumnya kegiatan ekonomi rakyat berada di pedesaan, atau pinggiran kota, dan para pelakunya berpendidikan tidak tinggi. Hal ini bisa dilihat pada data BPS (1993) yang menyatakan bahwa pelaku industri kecil yang tidak sekolah 3,75%, tidak tamat SD 20,63%, tamat SD 53,23%, tamat SMTP 14,96%, tamat SMTA 6,68%, dan di atas SMTA hanya 0,75%. Keadaan geografis dan tingkat pendidikan yang ada ini, menyebabkan ekonomi rakyat menghadapi persoalan yang berdimensi kultural, antara lain :

- a. Konflik antara kultur industrial dan kultur agraris

Kehidupan industri kecil di pedesaan, mencerminkan adanya konflik kultural, yaitu konflik antara kultur agraris yang muncul dari keadaan geografis pedesaan dengan kultur industri yang dibawa oleh usahanya yang bersifat industrial. Konflik itu muncul antara lain dalam hal memandang tentang waktu, uang dan makna kehidupannya di dunia ini. Waktu dalam kultur agraris lebih bersifat siklus, sementara dalam kultur industri lebih bersifat linier. Sedangkan yang dalam kultur agraris lebih bermakna sosial, yang berfungsi sebagai alat, sementara dalam kultur industri lebih bermakna ekonomi dan menjadi tujuan. Sementara harmoni, keseimbangan dan keselarasan hidup dalam kultur agraris lebih penting daripada kemajuan usaha yang dinyatakan dalam angka-angka pertumbuhan yang menjadi ukuran bagi kultur industrial (Sophia Wu Huang, 1993: 43-62).

Dalam konsep pengembangan ekonomi rakyat, yang perlu dipikirkan adalah mencari bentuk-bentuk sentetik kultur industrial rakyat, yang memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan kualitatif dan kuantitatif yang berlangsung secara gradual dan berkelanjutan, sehingga ekonomi rakyat dapat menjadi basis memenangkan persaingan ekonomi global, yang menuntut kualifikasi standar industri yang modern, yang berbasis pada penguasaan teknologi sehingga dapat diperoleh akurasi teknik, ketepatan waktu, serta kalkulasi harga yang rasional atau kompetitif (Martin De Vlieghere, 1994: 285-303).

#### b. Etos Kerja

Etos kerja pada dasarnya diturunkan oleh situasi kultur, sehingga konflik kultural yang terjadi dalam kehidupan ekonomi rakyat, berpengaruh pula dalam membentuk suatu etos kerja. Etos kerja sebagai rajutan nilai-nilai yang membentuk kepribadian seseorang dalam bekerja, akan sangat dipengaruhi oleh intensitas adanya konflik, sehingga berpengaruh pula dalam mengembangkan kerja sama bisnis, yaitu antara pelaku ekonomi rakyat (usaha skala kecil) dengan pelaku industri maju (usaha skala besar), terutama ketika keduanya hendak menjalin kerjasama bisnis (Musa Asy'arie, 1997: 33-72; M. Dawam Raharjo, 1990: 49-58).

Kegagalan kemitraan usaha yang pernah dijalin antara usaha skala kecil dengan usaha skala besar, antara lain dipengaruhi oleh adanya kesenjangan kultur dan etos kerja, yang tercermin dalam kesenjangan sistem manajemen dan penguasaan teknologi. Kemitraan lintas tidak terkait dengan pola pengembangan produksi secara terpadu, tetapi lebih kepada pemberian bantuan, baik permodalan, pelatihan maupun bantuan teknik, yang tidak terkait sama sekali dengan pengembangan sektor produksi dari usaha skala besar, sehingga bantuan yang diberikan, lebih bermakna sosial dan politik, yang tidak berpengaruh pada perubahan struktural.

Hal ini mungkin juga disebabkan oleh konsep awal dari pembangunan industri nasional, yang lebih berorientasi pada pertumbuhan dan pengembangan industri skala besar saja, dan industri skala besar itu memang tidak didisain sebagai bagian dari konsep pengembangan industri skala kecil, dimana diharapkan peran industri skala kecil dapat menjadi penyangga dan supporting produksi dari industri skala besar, agar fundamental industri bisa lebih kuat dan lebih efisien.

## **2. Problematik Struktur**

### **a. Permodalan**

Seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang, bahwa aspek permodalan selama ini (Robert J. Barro, 1993: 228-273), memang tidak berpihak kepada pelaku ekonomi rakyat atau usaha skala kecil. Pihak perbankan rasanya dibentuk bukan untuk melayani ataupun bukan untuk memberdayakan mereka, sehingga mereka memperoleh pinjaman dari para rentenir, yang bunganya jauh lebih besar dari bunga perbankan yang ada. Kalaupun pihak bank memberikan pinjaman kepada mereka, biasanya prosedurnya sangat tidak sesuai dengan realitas industri kecil, bahkan pihak bank menuntut jaminan yang lebih besar dari uang yang mereka pinjam, dengan jaminan yang aman, seperti sertifikat tanah dan bangunan.

Sementara itu, para pengusaha besar bisa memperoleh kredit jauh lebih besar dari jaminan yang diberikan, dengan cara yang mudah melalui proses KKN sehingga mereka dapat memperoleh fasilitas kredit murah, yang

seharusnya bukan untuk kalangan mereka, konon konglomerat Prayogo Pangestu menikmati bunga kredit yang sangat rendah, 2% setahun. Ketimpangan alokasi kredit itu antara lain terlihat adanya ketidakadilan di mana Bank Pemerintah, yakni sebanyak 42% kredit sindikasi bank pemerintah diberikan kepada 22 group nasabah besar/konglomerat. Sedangkan sisanya sebanyak 58% diberikan kepada pengusaha kecil/menengah yang notabene jumlahnya sangat besar. Ketimpangan juga terjadi pada alokasi kredit antar wilayah, di mana di Jawa merupakan wilayah terbesar memperoleh 67,22% dari total kredit yang diberikan kepada usaha skala kecil, di susul Sumatera 16,95%, Sulawesi 5,77%, Kalimantan 4,41%, Bali 2,62% dan propinsi lainnya 3,03%. Dari total kredit, kawasan barat Indonesia mendapatkan 86,79%, sementara sisanya 13,21% untuk kawasan timur Indonesia. (Suharsono Sagir, 1993)

Sementara itu, munculnya beberapa perusahaan modal ventura, yang antara lain dibentuk untuk tujuan pemberdayaan usaha skala kecil, dalam realisasinya terbentur pada pro-sedur teknis administratif, terutama yang berkaitan dengan penyertaan saham, yang menuntut adanya legalitas bentuk usaha, sementara aspek legalitas ini, sangat sulit dipenuhi oleh usaha skala kecil, yang bentuk usahanya tidak memiliki badan hukum, bukan saja karena pemilikan bersifat perorangan, tetapi juga karena skalanya yang sangat kecil yang belum atau tidak memerlukan badan hukum, bahkan badan hukum bisa jadi malah merugikan dan menyulitkan diri mereka sendiri, karena harus berurusan dengan proses birokrasi yang melelahkan dan perpajakan yang mempunyai kebiasaan bekerja seperti memburu binatang di kebun binatang.

Selanjutnya jikalau pun perbankan memberikan pinjaman kepada usaha skala kecil, setelah melalui proses administratif yang melelahkan, apakah benar mereka yang menikmati kucuran kredit tersebut, sementara harga jual produksi mereka ditekan oleh para pedagang, dengan harga yang sangat murah dan dengan tempo pembayaran lebih sebulan lamanya. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak para pengusaha besar dan para pedagang yang membeli produk mereka dengan pembayaran lebih dari satu



bulan, bukankah ini "kebo nyusu gudel", yang kecil justru membantu yang besar.

b. Pasar

Dalam kenyataan di lapangan, daya tawar ekonomi rakyat atau usaha skala kecil terhadap penguasaan pasar masih sangat lemah. Posisi tawar yang lemah, membuat perolehan keuntungan mereka sangat kecil dan tidak sebanding dengan perolehan keuntungan yang diambil oleh mereka yang menguasai pasar (para pedagang), sehingga pertumbuhan usaha mereka menjadi sangat lambat. Bahkan ada fenomena yang mematikan usaha skala kecil, yaitu ketika para pedagang itu dapat menjual produk yang dihasilkan oleh usaha skala kecil itu sudah besar jumlahnya, yang cukup layak untuk mendirikan usaha, sehingga mereka juga tidak segan-segan untuk mendirikan usaha sejenis, yang secara langsung dapat mematikan usaha skala kecil yang dulu mensuplay kebutuhan perdagangan mereka.

Secara struktural perlu diciptakan adanya suatu mekanisme pasar yang dapat berkembang secara sehat (Syahrir, 1992: 11-14), yang memungkinkan usaha rakyat atau usaha skala kecil mendapat perlindungan yang wajar, agar mereka mendapatkan ruang hidup yang memadai dari pada memberikan perlindungan pasar bagi usaha skala besar seperti yang terjadi selama ini di pabrik semen dan industri besar lainnya. Paling tidak dapat dimulai dari pemerintah sendiri yang mau membuka dan menjadikan dirinya sebagai pasar yang besar untuk memperkuat bagi pengembangan ekonomi rakyat atau usaha skala kecil.

c. Penguasaan Teknologi

Pada umumnya, penguasaan teknologi ekonomi rakyat atau usaha skala kecil masih sangat lemah, hal ini bisa disebabkan karena memang tingkat pendidikan mereka yang rendah, sehingga penguasaan informasi juga sangat terbatas, atau karena memang mereka tidak pernah mendapatkan bantuan teknologi yang tepat bagi mereka, atau mereka memang bukan konsumen teknologi, sehingga tidak ada perusahaan yang khusus mensuplai

peralatan yang cocok untuk mereka. Teknologi yang ada adalah teknologi yang sudah dikemas untuk kepentingan bisnis skala besar. Sehingga kesenjangan penguasaan teknologi ini pada gilirannya juga ikut menghambat kemajuan program kemitraan antara usaha skala besar dengan usaha skala kecil.

Di samping itu, mereka juga kurang mendapatkan latihan ketrampilan teknik, yang memungkinkan mereka dapat menguasai teknologi tepat guna. Sebanyak 87% dari seluruh industri kecil yang ada, belum pernah memperoleh ketrampilan, dan hanya 13% yang memperoleh ketrampilan. Sedangkan dari 13% itu, sebanyak 45% memperoleh ketrampilan di bidang produksi, 26% ketrampilan manajerial, 18% memperoleh kerampilan teknik pemasaran dan sisanya 11% memperoleh ketrampilan lainnya. (BPS 1993).

Perguruan tinggi kita seharusnya dapat menolong mereka, dengan memberikan pelayanan terhadap penguasaan teknologi tepat guna, melalui program pendampingan dan penyuluhan yang ada. Karena sebenarnya yang diperlukan bagi mereka adalah sentuhan kreatifitas atau kiat mengurai kesulitan teknis, melalui logika mereka sendiri, yang sesungguhnya tidak perlu melakukan loncatan teknologi dengan menggunakan peralatan dan mesin yang canggih, yang pada gilirannya justru memberatkan mereka sendiri, terutama dalam hal optimalisasi dan pemeliharannya.

### **3. Problematik Lingkungan**

Pada umumnya kegiatan ekonomi rakyat dan industri skala kecil masih sangat tergantung dan dipengaruhi oleh keadaan lingkungan di sekitarnya. Lingkungan di sini meliputi lingkungan geografis, lingkungan tradisi masyarakat dan lingkungan budaya kerja internal usaha ekonomi rakyat.

#### **a. Lingkungan geografis**

Usaha ekonomi rakyat, biasanya dipengaruhi oleh lingkungan geografisnya, baik dalam hal bahan baku yang dipakai usahanya, maupun posisi dan letak geografis daerahnya dalam jaringan komunikasi dan informasi du-nia usaha secara luas. Seperti usaha pengrajin mebel dari bambu, dalam sebuah desa terisolir di Gunung Kidul, yang sangat tergantung

pada bahan baku yang tersedia di sekitarnya, dan pengembangan usahanya yang sangat di pe-ngaruhi oleh posisi dan letaknya dalam jaringan komunikasi dan informasi dunia eknomi global. Karena jika ketergantungan pada bahan baku itu, tidak disertai pengembangan budi dayanya, yang dilakukan secara seimbang dengan pengembangan pasarnya, akan berakibat matinya usaha ekonomi rakyat tersebut.

b. Lingkungan Tradisi Masyarakat.

Lingkungan tradisi masyarakat ekonomi rakyat, terutama di pedesaan antara lain ber-bentuk upacara-upacara tradisional, baik dalam kaitannya dengan kehidupan sosial, kepercayaan ataupun keagamaan, seperti adanya upacara perkawinan, sadranan, suran, yang ternyata sangat berpengaruh pada peningkatan disiplin kerja untuk peningkatan produktivitas, karena pada saat-saat upacara tradisi tersebut berlangsung, biasanya jumlah karyawan yang masuk kerja sangat menyusut kecil. Bahkan kalau jumlah karyawannya hanya mengandalkan dari satu desa atau pun daerah tertentu, bisa terjadi libur kerja secara bersamaan, tanpa kejelasan (Thomas Donaldson, 1995: 85-112).

Kalau hal ini dibicarakan dengan mereka, mereka sangat menyadari akan dampak buruknya kepada perusahaan, tetapi mereka tidak berdaya, karena telah menjadi bagian dari kehidupan tradisi itu sendiri yang harus mereka lestarikan juga, sehingga sangat tidak mungkin untuk dihindari, apalagi ditolaknya, karena bisa terjadi mereka akan kehilangan akar dan ikatan hubungan dengan komunitas tradisionilnya. Mereka lebih memilih dikeluarkan dari perusahaan daripada harus dikeluarkan dari komunitas yang mengikat dan melestarikan akar budaya mereka.

c. Lingkungan Budaya Kerja Lnternal.

Industri kecil, atau usaha ekonomi rakyat pada dasarnya adalah bagian dari budaya besar masyarakatnya, dan secara internal juga membentuk lingkungan budaya kerja yang asal jadi, tidak ada proses riset atau pendalaman terha-dap produksi dan pengembangan usahanya, tidak ada standard mutu yang berlaku secara menyeluruh dalam proses produksinya,

juga tidak ada perencanaan waktu yang akurat, sehingga kelihatan adanya kesemrawutan dimana-mana. Untuk bersaing di pasaran global, persoalan tradisi budaya kerja ini akan menjadi masalah yang serius, karena akan berhadapan dengan tuntutan pasar yang makin kompetitif.

Untuk memecahkan persoalan ini, seringkali diadakan pelatihan di perusahaan lain yang lebih maju dalam segala halnya, dan di sana tenaga latihan ini, bekerja sesuai dengan standard teknik dan prosedur yang ada, dan secara individual mereka juga dapat menyesuaikan dengan tuntutan yang memerlukan tingkat standarisasi mutu yang tinggi di perusahaan yang menjadi tempatnya berlatih. Akan tetapi ternyata pemecahan itu tidak efektif, karena disiplin teknik itu hanya terjadi ketika yang bersangkutan ada di perusahaan yang maju itu, sehingga ketika mereka pulang kembali bekerja di tempat asalnya, dia akan mengulangi lagi tradisi budaya kerja yang lama. Mengapa itu terjadi, persoalannya tidak sederhana, karena tenaga dosen kita yang dikirim ke luar negeri, di sana setiap hari membaca di perpustakaan, produktif, dan ketika kembali lagi ke kampusnya, tradisi membaca pun ikut menurun lagi.

## **ETIKA ISLAM**

Rakyat Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, konon mencapai lebih 80% dari jumlah kurang lebih 200 juta penduduk Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu, kontribusi pemikiran Islam akan mempunyai makna penting, sebagai wujud kepedulian Islam terhadap umatnya, karena sudah pasti bahwa sebagian besar orang miskin dan para pe-nganggur di Indonesia itu adalah orang Islam. Oleh karena itu, mewujudkan ekonomi kerakyatan dapat dipandang sebagai kepedulian terhadap orang-orang miskin, dan sesungguhnya merupakan panggilan agama untuk tidak mendustakan agama (Samuel C. Weston, 1994:1-17). Alquran 107:1-3 mengatakan :  
Artinya: Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? mereka itulah orang yang mentelantarkan anak yatim dan tidak menyuruh memberi makan orang miskin.

Di samping itu, ekonomi kerakyatan dapat menjadi upaya agar kekayaan tidak hanya dikuasai dan beredar hanya dalam sekelompok elite kecil suatu bangsa, karena

akan mengakibatkan munculnya kesenjangan ekonomi yang sangat besar, serta ketidakadilan sosial yang pada gilirannya akan meruntuhkan ketahanan suatu bangsa. Alquran 59:7 mengatakan :

Artinya: Apa saja harta yang yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk negeri-negeri, maka itu adalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kantu saja. Apa yang didatangkan Rasul kepadamu, maka ambillah, dan apa yang dilarangnya kepadamu maka hentikanlah, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah keras siksa-Nya.

Dalam etika Islam (Majid Fakhry, 1991: viii-ix), usaha membangun dan mewujudkan ekonomi kerakyatan dalam era ekonomi pasar bebas ini, kiranya perlu dipikirkan beberapa hal, yaitu:

#### 1. Aspek Pemilikan

Dalam Islam pemilikan harta benda, apa-lagi yang diperoleh melalui usaha yang di dalamnya melibatkan orang lain dan dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia, pada dasarnya pemilikan oleh seseorang terhadapnya, tidak bersifat mutlak. Islam memang mengakui dan menjamin hak milik individualitas, tetapi pemilikannya itu tidak bersifat mutlak, karena di dalamnya ada hak orang lain. Alquran 51:19 mengatakan :

Artinya: Dan dalam harta mereka ada hak untuk orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta.

Sesungguhnya dalam setiap harta milik seseorang, selalu ada milik orang lain di dalamnya. Oleh karena itu, ia mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan untuk memberikan hak orang lain, melalui kewajiban zakat, infaq dan shadaqah. Alquran 9:103 mengatakan:

Artinya: Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah untuk membersihkan dan menyucikan mereka dengannya, dan doakanlah mereka, karena sesungguhnya doamu itu menjadi keten-traman bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Dalam kaitan ini, maka pemilikan industri besar harus terbuka, melalui pasar modal, masyarakat bisa ikut memilikinya, baik perorangan maupun

kelompok sosial, melalui institusi sosial yang ada, sehingga rakyat dalam pengertian luas, dapat melakukan kontrol terhadap manajemen dan kegiatan bisnisnya. Melalui kontrol masyarakat, diharapkan manajemen perusahaan makin profesional dan dapat menjalankan perusahaan untuk kepentingan rakyat yang lebih luas. Sedangkan untuk industri kecil dan menengah dimungkinkan untuk dimiliki secara perorangan.

Namun demikian, pada setiap perusahaan, sesuai dengan besar kecil kelas usahanya dan besar kecilnya keuntungan yang diperolehnya, mereka diwajibkan untuk menyisihkan sebagian keuntungannya untuk usaha-usaha meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia di sekitarnya. Pelaksanaan kepedulian sosial dari perusahaan ini tentunya berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan yang terpenting adalah tindakan politik pemerintah sendiri untuk memberikan perlindungan, dorongan serta fasilitas untuk memajukan setiap perusahaan itu, karena tanpa tindakan politik yang konkret untuk memberdayakan usaha mereka, akan sangat sulit kepedulian sosial itu dapat dijalankan secara terpadu dan berkelanjutan (Cho Soon, 1994:155-165).

## 2. Aspek Produk

Dalam sistem ekonomi kerakyatan yang sehat, maka produk yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dapat dijual dengan harga yang kompetitif, terjangkau oleh daya beli rakyat dan secara kualitatif tidak merugikan kehidupan rakyat kecil, antara lain dengan memberikan timbangan yang tepat dan perlakuan yang adil. Alquran 6:152 mengatakan :

Artinya.:Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah yang adil, walaupun dia adalah kerabat, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah yang diperintahkan-Nya kepadamu agar kamu mendapat peringatan.

Oleh karena itu, produk yang di keluarkan oleh dunia industri, baik besar, menengah dan kecil harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi mutu maupun harga, dan dapat bersaing di pasaran bebas. Hanya saja perlu ditata jenis produksinya, sehingga antara industri besar, menengah dan kecil, tidak

bersaing dalam produk yang sama, karena dapat menimbulkan munculnya persaingan yang tidak seimbang dan persaingan tidak sehat. Untuk itu, peranan lembaga konsumen harus diberdayakan, melalui keputusan politik yang diatur oleh pemerintah.

Pada hakikatnya melalui produk yang bermutu dan murah, sesungguhnya rakyat banyak dapat diringankan bebannya, karena uangnya dapat dihargai dengan produk yang memang layak, seperti illifat perusahaan Matsushita ketika akan memproduksi pompa air dengan skala yang besar, sehingga harganya murah, terjangkau kantong rakyat, sehingga secara tidak langsung dapat meringankan beban rakyat banyak dalam hal pengadaan air.

### 3. Aspek Pasar

Dalam ekonomi pasar bebas ini (Syahrir, 1995: 586-588), munculnya persaingan tidak bisa dihindarkan, dan dalam hal tertentu dapat menguntungkan rakyat, karena rakyat akan memperoleh barang yang sesuai yang sudah diseleksi oleh mekanisme pasar, sedangkan barang yang jelek dan mahal dengan sendirinya tidak akan laku. Akan tetapi persoalannya adalah bagaimana persaingan bebas itu dapat berjalan secara terbuka, adil dan tidak memihak. Alquran 5:48 mengatakan :  
Artinya: Bagi tiap-tiap umat di antara kamu, Kami telah jadikan peraturan dan jalan, dan kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat, tetapi Allah hendak menguji kamu tentang apa yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berkompetisilah kamu dengan berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah tempat kembali kamu sekalian, maka Dia akan kabarkan kepadamu apa yang kamu perselisihkan.

Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat, maka perlu ditata kembali kegiatan bidang produksi antara industri besar, menengah dan kecil, sehingga mereka mempunyai segmentasi pasar sendiri-sendiri, dan melalui mekanisme pasar bebas, antara masing kelas akan dapat bersaing dengan seimbang dan akan memaksa industri-industri itu hams efisien, karena kalau tidak efisien dengan sendirinya akan kalah bersaing, dan secara tidak langsung, rakyat pada umumnya akan memperoleh keuntungan.

Yang lebih ideal lagi, industri besar harus membuka diri untuk menjadi pasarnya industri menengah dan kecil!, sehingga terjadi proses kemitraan yang saling memperkuat, karena selama ini, kemitraan berlangsung bukan karena kepentingan bisnis, tetapi oleh tekanan politik. Oleh karena itu, harus ada design besar yang menata bidang kegiatan industri besar, menengah dan kecil untuk dapat menjalankan kegiatan yang saling memperkuat secara bisnis, karena banyak produk yang lebih efisien; jika diserahkan pengerjaannya oleh perusahaan menengah atau kecil.

Dalam kaitan ini, sebelum industri besar dibuka, sebaiknya disiapkan dahulu industri kecil dan menengahnya, sebagai supporting dari industri besar dan dengan demikian akan melahirkan fundamental industri yang kuat, dan saling menghidupi dan memperkuat. Kehadiran industri besar tidak boleh mematikan industri menengah dan kecil, seperti yang selama ini terjadi pada industri tekstil dan pertenunan.

#### 4. Aspek Kemitraan Usaha

Sesungguhnya fundamental ekonomi suatu bangsa akan kuat, jika terjadi kemitraan bisnis yang baik, saling menghidupi dan memperkuat antara sesama pelaku ekonomi, baik yang kecil, menengah dan besar, dalam sinergi dan aliansi bisnis yang saling menguntungkan ber-sama-sama. Alquran 5:2 mengatakan :

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.

Melalui kemitraan bisnis yang realistis antara industri besar, menengah dan kecil, pada dasarnya akan terjadi proses pembinaan terhadap industri menengah dan kecil secara alamiah, karena kalau ingin menjadi mitra bisnis industri besar, maka industri menengah dan kecil! mau tidak mau harus menyesuaikan dengan standard prosedur dan teknik, untuk memperoleh hasil yang memenuhi standar yang ditetapkan industri besar, sementara itu, untuk mencapai mutu produksi yang standard, industri besar diharapkan memberikan bimbingan dan pembinaan dari berbagai aspeknya. baik teknik ataupun manajemen. Idealnya, keuntungan industri besar, sebagian dipakai untuk pembinaan industri menengah dan kecil, seperti



yang dilakukan PT.ASTRA dengan Yayasan Dharma Bhakti Astra yang khusus mengadakan bimbingan dan pembinaan terhadap industri menengah dan kecil terutama yang menjadi mitra bisnis dari berbagai kelompok industri yang ada dalam group ASTRA.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, Sritua, "Dialektika Hubungan Ekonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat,"  
Kelola: Gadjah Mada University review, No. 10/IV/1995, MM UGM,  
Yogyakarta, 1995
- Asy'arie, Musa, Islam: Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, LESFI dan  
Institut Logam, Yogyakarta, 1997
- Bank BNI (Persero) Tbk., Economic review, No. 188/1999, Jakarta, 1999
- Barro, J., Robert, Macroeconomics, 3th Edition, John Weley & Sons Inc., New York,  
1993
- Booke, J.N., Economics and Economic Policy of Dual Societies, H.D. Tjeeuk  
Willink, Harlem, 1951
- Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terje-mahannya, Jakarta, 1991
- Donaldson, Thomas, and Thomas W. Dunfel, "Integrative Social Contracts Theory: A  
Communitarian Conception of Economic Ethics", Economics and  
Philosophy, 11, Cambridge University Press, 1995
- Eatwell, John, et. Al., The New Palgrave: A. Dictionary of Economics, Vol. 3: K-P,  
The Macmillan Press Ltd., London, 1987
- Fakhry, Majid, Ethical Theories in Islam, E.J. Brill, Leiden, 1991
- Hall, R., John, and Mary Jo Neitz, Culture: Sociological Perspectives, Prentice Hall,  
New Jersey, 1993
- Huang, Wu, Shophia, "Structural Change in Taiwan's Agricultural Economy", Econo-  
mic Development and Cultural Change, Vol. 42 No. 1, University of  
Chicago Press, Chicago, 1993
- Jawa Pos, Rabu 5 mei 1999 Kompas, Kamis 18 Juni 1998
- Krueger, O., Ann, "Virtuous and Vicious Circles in Economic Development", The  
American Economic Review, Vol. 83, No. 2, New York, May 1993

- Mannheim, Karl, *Ideology and Utopia; An Introduction to the Sociology of knowledge*, terj. Louis Wirth and Edward Shils, Routledge & Kegan Paul, London, 1952
- Massey, Doreen, *Spatial Divisions of labour: Social Structures and the Geography of Production*, 2nd Edition, MacMillan, London, 1995
- Mubiyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988
- Prayitno, Hadi, dan Budi Santoso, *Ekonomi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996
- Rahardjo, M., *Dawam, Etika Ekonomi dan Manajemen*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1990
- Robbins, Lord, *An Essay on the Nature and Significance of Economic Science*, MacMillan & Co. Ltd., Chapter I & II, London, 1962
- Sagir, Suharsono, *Usahawan Indonesia*, September, 1993
- Samuelson, A., Paul, and William D. Nordhaus, *Economics*, 12th Edition, McGraw-Hill International, New York, 1985
- Soon, Cho, "Government and Market in Economic Development", *Asian Development Review; Studies of Asia and Pasific Economic Issues*, Vol. 12, No.2, Asian Development Bank, Manila, 1994
- Syahrir, *Analisis Ekonomi Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992
- \_\_\_\_\_, *Persoalan Ekonomi Indonesia: Moneter, Perkreditan, dan Neraca Pembayaran*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Todaro, T., Michael, *Economic Development*, Longman, New York, 1994
- Vlieghe, Martin, De, "A Reappraisal of Friedrich A. Hayek's Cultural Evolutionism", *Economics and Philosophy*, 10, Cambridge University Press, New York, 1994
- Weston, Samuel, "Toward A Better Understanding of the Positive/Normative Distinction in Economics", *Economics and Philosophy*, 10, Cambridge University Press, New York, 1994.